

**HAMBATAN *MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS* DI INDONESIA
DALAM PEMBERANTASAN MALARIA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2000-2010**

RESUME

Malaria bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di dunia dan telah menjadi salah satu masalah global yang ingin diatasi bersama-sama. Keinginan untuk mengatasi masalah ini tampak dari lahirnya Deklarasi Millenium pada KTT Millenium PBB bulan September 2000 yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Majelis Umum PBB kemudian melegalkannya ke dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 tentang Deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa-bangsa. Deklarasi ini menyepakati adanya Tujuan Pembangunan Global atau Millenium Development Goals.

Salah satu tujuannya adalah melawan penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya, yaitu malaria dan tuberkulosa. Indonesia merupakan salah satu

negara yang ikut menandatangani kesepakatan *Millenium Development Goals* (MDGs) tersebut sehingga terikat untuk melaksanakan pemberantasan malaria.

Upaya mewujudkan semua tujuan MDGs, termasuk dalam pemberantasan malaria, telah menjadi komitmen masyarakat internasional. Komitmen ini ditunjukkan dengan kepedulian negara-negara maju yang kemudian tergabung dalam Global Fund untuk membiayai program-program pemberantasan malaria.

Keikutsertaan Indonesia dalam MDGs memperlihatkan adanya keinginan Indonesia dalam mengatasi masalah malaria. Pemerintah Indonesia mengupayakan pencapaian tujuan MDGS dengan cara memasukkan indikator-indikator keberhasilan MDGs sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Khusus dalam tujuan ke 6 MDGs yakni pemberantasan malaria, pemerintah mencanangkan program Gerakan Berantas Kembali Malaria atau yang di kenal dengan Gebrak Malaria Gebrak Malaria.

Dengan program yang sama, beberapa daerah di Indonesia yang berhasil menurunkan angka kejadian malaria di wilayahnya secara signifikan. Salah satu

contohnya adalah propinsi NAD khususnya kota Sabang. Kota Sabang merupakan salah satu wilayah endemis malaria di Indonesia yang berhasil menurunkan secara drastis kasus malaria klinis dari 269 AMI tahun 2001, menjadi 32,65 AMI tahun 2009. Berbeda dengan NTT yang terkesan sangat lambat dalam mencapai MDGs dalam pemberantasan malaria.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat pencapaian MDGs di Indonesia dalam pemberantasan malaria di Nusa Tenggara Timur, antara lain:

Pertama, Rendahnya Respon pemerintah lokal terhadap kebijakan pemerintah nasional dalam hal ini tidak adanya payung hukum/Perda dalam pelaksanaan program di daerah. Perda satu-satunya tentang pemberantasan malaria di NTT adalah Perda No 3 Tahun 2005. Respon pemerintah lokal relatif rendah dilihat dari kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam hal penanganan malaria mulai dari penemuan penderita, pengobatan, surveilans, pemberantasan vektor, serta monitoring program.

Kedua, Infrastruktur pendukung dalam pemberantasan malaria di NTT sangat rendah. Meskipun

sarana rumah sakit serta puskesmas terus bertambah, tetapi tenaga kesehatan masih sangat kurang, puskesmas-puskesmas yang ada juga tidak memiliki sarana yang memadai untuk menangani malaria. Puskesmas di NTT hampir seluruhnya tidak memiliki mikroskop, sedangkan rumah sakit yang memiliki laboratorium untuk menemukan penyakit malaria hanya ada beberapa. Akibatnya, penemuan penderita hanya didasarkan pada gejala klinis, bukan hasil uji laboratorium. Sementara, infrastruktur pendukung berupa sarana transportasi sangat sulit sehingga penduduk tidak dapat mengakses ke pusat pelayanan kesehatan.

Ketiga, Budaya masyarakat yang tidak responsif terhadap perubahan. Budaya yang dipandang tidak responsif adalah kebiasaan masyarakat keluar di malam hari, kurangnya perilaku hidup sehat, kepatuhan minum obat, kepercayaan kepada dukun kampung dan sebagainya. Partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah, termasuk dalam hal pemberantasan malaria masih sangat rendah. Hal ini sejalan dengan tingkat pendidikan yang rendah di NTT.